BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi antara agama (Islam) dan politik harus diakui menjadi perbincangan yang tak pernah usai di kalangan para akademisi. Hal ini memang bukanlah sesuatu yang tabu. Potret relasi ini bisa dilacak genealoginya dengan masa lalu, pada masa Nabi Muhammad, sang pembawa risalah Islam. Ada sebuah kisah yang sering disebut mengindikasikan pergulatan antara Islam dan politik.

Seorang pedagang bernama Afif Al-Kindi datang ke Makkah ketika musim haji. Kemudian ia melihat seorang keluar, diikuti seorang wanita dan pemuda, lalu mengerjakan shalat di depan ka'bah. Ibnu Abbas (paman Nabi Muhammad) yang ada di samping Afif Al-Kindi memberi tahu bahwa yang keluar dan melaksanakan shalat di depan ka'bah adalah keponakannya, Muhammad bin Abdullah. Sementara sang wanita adalah Khadijah dan sang pemuda adalah Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas menuturkan, bahwa Muhammad mengaku dia adalah utusan Allah dan dia meyakini akan menghancurkan dua negara adidaya, Romawi dan Persia.[1]

Kisah di atas acapkali dianggap sebagai bukti historis kuatnya dimensi politik dalam dakwah Nabi Muhammad. Dalam fakta historis lain, sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad, bahkan sebelum dimakamkan, terjadi pertemuan yang mengarah pada kontestasi kepemimpinan politik (atas umat Islam) oleh kaum Muhajirin dan Anshar. Pertemuan yang terjadi di Saqifah Bani Saidah ini

[1]Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam Menelusuri Jejak Pergumulan yang Tak Kunjung Usai di Nusantara* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memunculkan perdebatan terkait siapa yang pantas dan sah untuk menggantikan kepemimpinan pasca-nabi.[2]

Rangkaian peristiwa munculnya kelompok-kelompok dalam Islam, umpamanya, juga tidak lepas dari masalah politik. Kelahiran Syi'ah, Khawarij, Jabariyah, Qodariyah, Murji'ah, hingga Ahlussunnah juga berkelindan dengan persoalan politik. Narasi tentang politik menjadi bagian integral dari kelahiran kelompok-kelompok Islam itu. Tentu kita sepakat bahwa persoalan politik tidaklah identik dengan hal negatif.

Sejarah mencatat, nuansa politik yang melingkupi kelahiran kelompok-kelompok di atas, ada yang sebab carut marut politik, keluar dari urusan politik, dan lebih *concern* pada gerakan kultural, seperti Ahlussunnah yang dimotori Hasan al-Bashri, ada juga yang menggunakan agama untuk kepentingan politik, seperti Jabariyah. Pergulatan antara Islam dan politik menjadi fase penting yang akhirnya melahirkan kelompok-kelompok dalam Islam.[3] Meskipun motif kelahiran, bagaimana dan sejauh mana hubungan dengan politik mendapati perbedaan.

Dalam konteks Indonesia juga demikian. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan di Indonesia bisa dibilang lahir sebab nuansa politik. Lebih tepatnya merespon kebijakan politik yang dikeluarkan penguasa Tanah Hijaz. Ketika Muhammad bin Abdul Wahab menjalin kerjasama dengan penguasa Dir'iyah, Muhammad bin Saud (setelah sebelumnya Muhammad bin Abdul

---

[2]Ibid., 26. Terkait pertemuan ini, Jufri memberikan pandangan bahwa yang menjadi fokus utama adalah tuntutan sosial-politik umat. Tak ada penggunaan (ayat) Al-Qur'an untuk memperkuat klaim masing-masing, baik Muhajirin atau Anshar. Lihat Syed Hussain Mohammad Jafri, *Agama dan Negara dalam Pandangan Imam Ali* (Yogyakarta: RausyanFikr, 2016), 18.

[3]Terkait kelahiran kelompok-kelompok ini, selengkapnya dalam Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: SAS Foundation, LTN PBNU, 2012), 81-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab terusir dari Uyainah) menjadikan pola keberagamaan di tanah Hijaz berubah. Perkembangan politik di tanah Arab ini berdampak pada pemusnahan situs-situs peradaban Islam dan pluralitas *madzhab* keagamaan yang dibatasi.[4] Meyikapi hal ini, ulama di Indonesia membentuk delegasi bernama Komite Hijaz (sebuah kepanitiaan kecil yang dibentuk sekitar tahun 1924-1925) yang menjadi cikal bakal lahirnya NU.[5]

Seiring berjalannya waktu, NU ikut dalam perjuangan kemerdekaan, hingga kondisi mengharuskan NU terjun, secara institusi, ke gelanggang politik praktis. Sebagai anggota Masyumi di awal kemerdekaan, pada tahun 1952 NU memutuskan untuk keluar dari wadah aspirasi politik kelompok Islam ini. NU memilih untuk menjadi partai politik sendiri. Pada pemilu tahun 1955 Partai NU yang merupakan wadah perjuangan politik bagi warga NU, memperoleh 45 kursi di DPR. Ini berbeda jauh dengan ketika masih bergabung bersama Masyumi. Saat masih di Masyumi, NU hanya mendapat jatah 8 kursi.[6]

Kiprah NU di panggung politik praktis terus berlanjut dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada 1973 pemerintah menghendaki penyederhanaan partai politik, menjadi tiga partai saja. NU memfusikan fungsi politiknya kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tak berhenti di situ, ketidaknyamanan kini (juga) menghinggapi NU di “rumah barunya” tersebut. Dalam perkembangannya jatah kursi untuk NU semakin berkurang.

Pergulatan panjang antara NU dan politik ini, pada akhirnya membawa NU untuk menjauh dari politik, melalui Muktamar-nya ke 27. Muktamar yang

---

[4]M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU* (Yogyakarta: Manhaj, Jember: Ikatan Keluarga PMII Jember, 2010), 49.
[5]Majalah AULA, No. 4 Tahun XXXVIII April 2016, 8.
[6]AyuSutarto, *Menjadi NU Menjadi Indonesia Pemikiran KH. Abdul Muchit Muzadi* (Surabaya, Khalista, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkan pada tahun 1984 di Situbondo itu memutuskan bahwa NU tidak (lagi) terikat secara organisatoris, dengan organisasi sosial maupun politik manapun. Posisi ini ditegaskan lagi pada tahun 1994, dimana NU membebaskan diri dari keterikatan dengan partai yang ada kala itu dan "memberi lampu hijau" pada warganya untuk masuk partai politik manapun.[7]

Ketika reformasi bergulir, dengan segenap hiruk-pikuknya, muncul tuntutan di kalangan warga NU untuk mendirikan partai politik (lagi). Mencermati dinamika yang terjadi, bahkan awalnya terjadi penolakan dari beberapa pengurus PBNU,[8] namun sesuai dengan Rapat Harian PBNU tanggal 25 Mei 1998, tanggal 17 dan 22 Juni 1998, PBNU mengeluarkan surat tugas nomor 925/A.II/03/6/1998 kepada 14 orang untuk menginventarisir dan merangkum usulan-usulan mengenai pembentukan partai politik untuk mewadahi aspirasi politik warga NU; mengkoordinasikan warga NU yang ingin membentuk partai politik untuk mewadahi aspirasi politik warga NU; dan membatu keinginan warga NU untuk membentuk satu partai politik yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.[9]

Tim yang beranggotakan 14 orang ini (dengan rincian 5 orang sebagai Tim Lima dan 9 orang sebagai Tim Asistensi) akhirnya memutuskan tidak mendirikan Partai NU, tetapi memfasilitasi berdirinya partai yang punya hubungan historis, aspiratif, dan kultural dengan NU, bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

---

[7]Ibid., 43

[8]Penolakan itu di antaranya muncul dari Sekretaris Jendral PBNU, Ahmad Bagja yang tidak setuju PBNU membuat partai politik. Begitujuga yang tidak *mikir* partai dari NU dan menganggap penting pembahasan seputar itu. Meskipun pada akhirnya, gelombang ketidak setujuan itu tidak menghalangi pendirian partai. Lihat Mahrus Ali dan MF. Nurhuda Y, *Pergulatan Membela yang Benar Biografi Matori Abdul Djalil* (Jakarta: Kompas, 2008), 170-171.

[9]Ushfuri Anshor, *Belum Terlambat Sebelum Kiamat* (Jakarta:DPP PKB, 2012), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deklrasi (kelahiran) PKB dilangsungkan 1 bulan pasca-surat tugas dikeluarkan, tepatnya pada 23 Juli 1998.

Pada posisi ini, bisa dibaca sebagai wujud relasi antara NU dan politik pasca-reformasi. Dalam skala lokal Jawa Timur, pola relasi NU dan politik juga menarik dikaji. Keputusan PBNU yang memfasilitasi berdirinya PKB, juga turut diikuti kepengurusan tingkat bawah, seperti turut andilnya NU Jember yang saat itu berada di bawah kepemimpinan H. Mukhson Sudjono dalam memfasilitasi dan mem-*back up* pendeklarasian PKB cabang Jember. Pun NU Jember juga mendampingi setiap proses perpolitikan yang dilakukan oleh PKB.[10]

Beberapa hal lain, yang bisa dibaca sebagai relasi NU dengan politik, umpamanya ketika Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, peran tokoh-tokoh NU Jawa Timur juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Kiai Abdullah Faqih, Langitan, Tuban adalah kiai yang sering disebut-sebut sosok utama dalam majunya Gus Dur sebagai presiden.[11] Begitujuga saat masa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) tahun 2004. Di kalangan nahdliyyin (sebutan bagi warga NU) Jawa Timur, bahkan muncul istilah "Poros

---

[10]Abdul Haris, dkk, *"Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru (Studi Kasus NU Jember, Jawa Timur)"*, http://www.averroes.or.id/pergeseran-perilaku-politik-kultural-nahdlatul-ulama-nu-di-era-multi-partai-pasca-orde-baru-2.html (Sabtu, 14 Mei 2016, 20.08)

[11]Gus Dur Files, "Ini 5 Kiai Khos yang Menentukan", http://www.gusdurfiles.com/2016/03/inilah-5-kiai-khos-yang-menentukan.html (Jum'at, 13 Mei 2016, 13.04). Memang harus diakui, pergulatan NU dan politik di sisi lain juga beriringan dengan bersemainya bibit-bibit NU dengan kecakapan intelektual dan politik yang bisa diperhitungkan. Di era awal, sebut saja Kiai Wahid Hasyim, Kiai Idham Chalid dan Kiai Syaifuddin Zuhri. Persemaian itu berlanjut seperti lahirnya tokoh sekaliber Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam pandangan Dawam Rahardjo, hadirnya Gus Dur ini memberikan dampak positif pada lahirnya generasi muda NU (baru) seperti Ulil Abshar Abdalla, A. Muqsith Ghozali, Guntur Ramli dan Maman Imanul Haq. Dawam juga mengakui bahwa Gus Dur menyusup ke mana-mana dan menempatkan kader-kader NU di berbagai organisasi dan pemerintahan. Pun dengan kegiatan yang sangat berorientasi kepada kepentingan NU. Lihat Rumadi (ed.) *Damai Bersama Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2010), 142-146. Sebagai catatan, beberapa tokoh yang disebut di atas, turut mewarnai perpolitikan tanah air, menjelang dan pasca-reformasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langitan" dan "Poros Lirboyo". Istilah ini merujuk pada dua pesantren "sepuh" dan masyhur di lingkungan NU, yakni Pesantren Langitan di Tuban dan Pesantren Lirboyo di Kediri.

Dua poros di atas merupakan representasi dari diferensiasi aspirasi politik nahdliyyin Jawa Timur. "Poros Langitan" dengan Kiai Abdullah Faqih-nya merapat ke Wiranto-Sholahuddin Wahid, sementara "Poros Lirboyo" dibawah Kiai Idris Marzuki merapat ke pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.[12] Tak hanya itu, relasi lain juga muncul dalam kontestasi politik lokal Jawa Timur, yakni pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 dan 2013.

Dalam dua Pilkada Jawa Timur (terakhir) itu, warga NU juga dihadapkan pada diferensiasi aspirasi politik. Pada tahun 2008 antara Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah-Mudjiono, sementara di tahun 2013 antara Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah-Herman. Sebagai catatan, Saifullah Yusuf pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dua periode, yakni 2000-2005, 2005-2010.

Sementara Khofifah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU sampai sekarang. Tepatnya dari periode 2001-2006, 2006-2011, 2011-2016, 2017-2022. Dua kader NU itu berkontestasi dalam hajatan lima tahunan, Provinsi Jawa Timur. Tentu sebagai tuan rumah dari hajatan ini, NU Jawa Timur dibayangi tarik-menarik untuk mendukung kekuatan politik tertentu.

Relasi lain antara NU Jawa Timur dan politik nampak pula dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (pileg) terakhir, yakni pada tahun 2014. Pada

[12]Suara Merdeka "Poros Langitan dan Poros Lirboyo", http://www.suaramerdeka.com/harian/0406/21/pem04.htm (Jum'at, 13 Mei 2016, 13.04)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pileg tahun 2014 ini, muncul rekomendasi dari Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur atas calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Timur. Ada lima calon DPD yang mendapat rekomendasi resmi dari PWNU Jawa Timur untuk mengarungi kontestasi pileg 2014. Lima calon DPD tersebut yakni Kiai Hasib Wahab, Ainul Yakin, Istibsjarah, Dwi Astutik, dan Khodijatul Qodriah.[13]

Dalam hal ini, meski sejak tahun 1984 NU menyatakan tidak terikat dengan organisasi sosial dan politik manapun, namun di lapangan NU masih memperlihatkan relasi dengan politik yang dibangun baik melalui instrumen non-institusi maupun melalui institusi itu sendiri. Relasi melalui instrumen non-institusi terwujud, umpamanya melalui berperannya kiai struktural NU Jawa Timur pada pilpres 2004, sementara relasi melalui institusi terwujud pada surat rekomendasi NU Jawa Timur atas calon anggota DPD.

Berkenaan dengan penelitian ini, dua relasi (baca: NU Jawa Timur dengan pilpres 2004 dan NU Jawa Timur dengan pileg 2014) akan ditelaah lebih lanjut. Penekanan pada dua relasi ini berdasar pada beberapa alasan.[14] Pertama, pilpres 2004 menempatkan NU pada posisi dilema. Di satu sisi Ketua Tanfidziah PBNU non-aktif, Kiai Hasyim Muzadi tampil menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Megawati, di sisi lain, cucu *Hadratussyaikh* Hasyim Asy'ari (pendiri NU), Kiai Salahuddin Wahid (Gus Sholah) tampil menjadi cawapres mendampingi Wiranto.

---

[13]NU Online "PWNU Jatim Rekomendasikan 5 Anggota DPD, "http://www.nu.or.id/post/read/16193/pwnu-jatim-rekomendasikan-5-anggota-dpd (Senin, 09 Mei 2016, 14.32).

[14]Dua relasi ini (baca: NU Jawa Timur dengan pilpres 2004 dan pileg 2014) harus diakui mempunyai bobot tersendiri. Memang tidak bisa dipungkiri, pada pilgub 2008 dan 2013 ada nilai lebih dengan turut andilnya dua kader NU. Namun, meskipun demikian, apabila "berhenti" pada tahun 2008 atau 2013, tentu tidak bisa menjadi titik tolak prospek relasi NU Jawa Timur dan politik ke depannya. Sebab, setelah tahun 2013 ada kontestasi yang lebih besar, yakni pileg (DPD) tahun 2014 yang juga melibatkan NU Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pilpres tahun 2004 menjadi pemilihan presiden pertama setelah "presiden NU", Gus Dur, jatuh dari kursi kepresidenan. Ketiga, pilpres 2004 menjadi pilpres pertama yang langsung dipilih oleh rakyat. Tiga alasan ini akan menjadi pijakan untuk membaca kondisi politik di internal NU, tepatnya dalam kaitan dengan relasi antara NU Jawa Timur dan politik. Termasuk sejauh mana penggunaan sumber daya NU di tengah kebebasan politik (pasca-reformasi) dan bagaimana peran NU Jawa Timur dalam konstelasi politik.

Sementara pada pileg (DPD) tahun 2014 beralasan, pertama, lahirnya relasi antara NU Jawa Timur dengan politik secara institusi (relasi secara institusi ini tidak terlihat pada pileg (DPR dan DPRD) dan pilpres 2014). Kedua, menjadi pemilihan terakhir pasca-reformasi yang akan menjadi indikator posisi NU Jawa Timur dan konstelasi politik. Ketiga, menjadi titik tolak prospek relasi NU Jawa Timur dan politik kedepannya.

Mengetengahkan dua unsur ini (baca: PWNU Jawa Timur dan politik) merupakan upaya untuk menelaah dan menjelaskan pola relasi. PWNU Jawa Timur tak bisa dipungkiri mempunyai posisi dan pengaruh yang sangat diperhitungkan dalam konstelasi politik. Telaah ini menjadi menarik, sebab akan memberikan penjelasan tentang posisi elit agama (dalam hal ini NU) dalam konstelasi politik.

Posisi elit agama ini dapat dibaca sebagai budaya politik yang berkembang di Indonesia. Berkenaan dengan hal itu, sejauh mana posisi *khittah* dalam dinamika NU dan politik pasca-reformasi juga akan diketengahkan. Sebab *khittah* NU ini akan memberikan gambaran tentang prospek posisi elit agama dalam konstelasi politik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait pemilihan lokasi di Jawa Timur, beralasan sebab sebagaimana disampaikan Hilmy, bahwa Jawa Timur adalah wilayah di Pulau Jawa yang paling dinamis dan heterogen dari perspektif sosial, budaya dan politik.[15] Sementara pemilihan pasca-reformasi (2004-2014) beralasan gelagat politik di era kebebasan yang begitu nampak, di sisi lain sudah ada keputusan tertinggi yang menyatakan larangan keterlibatan NU secara institusi ke gelanggang politik praktis. Maka dengan alasan inilah, penulis mengangkat penelitian dengan judul **"Relasi Kuasa Nahdlatul Ulama (NU) dan Politik Pasca-Reformasi (Studi Kasus NU Jawa Timur Tahun 2004-2014)"**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Bentuk Relasi Kuasa Nahdlatul Ulama dan Politik Pasca-Reformasi di Jawa Timur Tahun 2004-2014 ?
2. Bagaimana Proses Terbentuknya Relasi Kuasa Nahdlatul Ulama dan Politik Pasca-Reformasi di Jawa Timur Tahun 2004-2014 ?
3. Bagaimana Prospek Relasi Kuasa NU dan Politik dalam Suksesi Kepemimpinan Politik ke Depan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengklasifikasikan bentuk relasi kuasa Nahdlatul Ulama dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014.

[15]Masdar Hilmy, *Islam Politik dan Demokrasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2014), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mendeskripsikan proses terbentuknya relasi kuasa Nahdlatul Ulama dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014.
3. Untuk menganalisis prospek relasi kuasa NU dan politik dalam suksesi kepemimpinan politik ke depan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan relasi kuasa NU dan politik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau pertimbangan bagi peminat kajian keislaman. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan para pembaca pada umumnya, ketika mengkaji relasi kuasa NU dan politik.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus membahas relasi kuasa Nahdlatul Ulama (NU) dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014. Namun ada beberapa penelitian yang mengetengahkan relasi semacam ini, diantaranya :

a. Penelitian dengan judul “Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru (Studi Kasus NU Jember, Jawa Timur)” oleh Abdul Haris, dkk. Dalam penelitian ini dibahas fenomena pada diri NU dalam hal berpolitik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat perubahan peta sosial-politik yang kemudian direspon dengan cara, diantaranya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Langkah ini tentunya tak bisa dilepaskan dari peran partisipatif warga NU di tingkat daerah, seperti Jember. Menurut keterangan yang berhasil dihimpun oleh peneliti, ada keterlibatan NU Jember dalam pembentukan PKB. Bahkan sudah berlangsung lama yakni ketika muncul wacana pembentukan partai politik di lingkungan internal NU (pasca-reformasi). Beberapa tokoh dan kader muda NU Jember aktif melakukan berbagai kegiatan diskusi tentang kemungkinan NU membentuk partai sendiri. Serangkaian kegiatan diskusi yang disponsori kader-kader muda NU Jember melibatkan tokoh-tokoh dan segenap warga NU Jember dari berbagai elemen. Puncaknya, NU Jember yang saat itu berada di bawah kepemimpinan H. Mukhson Sudjono memfasilitasi dan sekaligus mem-*back up* pendeklarasian PKB cabang Jember yang dilakukan di Pondok Pesantren Sumberwringin pimpinan K.H Khatib Umar. Dalam perjalanannya, NU Jember juga mendampingi setiap proses perpolitikan yang dilakukan oleh PKB.[16]

b. Tesis dengan judul "Transformasi Islam Politik Era Reformasi (Studi Terhadap Pendidikan Politik PKB Tahun 1998-2008 di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur)" oleh Zuhri Humaidi. Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dalam tesis ini dipaparkan bahwa pasca reformasi, PKB muncul sebagai salah satu partai yang

[16]Abdul Haris, dkk, "*Pergeseran Perilaku...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh reputasi luas. Dalam pandangan peneliti, paling tidak hal ini disebabkan dua hal pokok, yaitu perolehan suaranya yang cukup signifikan pada Pemilu 1999 dan 2004 serta kehadirannya sebagai partai politik yang muncul dari rahim NU –organisasi muslim terbesar di Indonesia-. Terkait pendidikan politik, di Probolinggo, hal ini diimplementasikan melalui enam hal, yakni; kampanye Pemilu dan Pilkada, pelatihan politik kader dan diskusi publik, pembentukan organisasi tani dan nelayan, penghijauan lingkungan, patronase kyai dan kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan masjid. Pada tataran praktis, PKB merupakan partai terkuat di daerah ini dengan memenangi dua kali Pemilu. Keberhasilan PKB tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan keagamaan masyarakat Probolinggo yang notabene merupakan pengikut NU yang taat. Sementara relevansi pokok dari pendidikan politik PKB adalah memberikan kontekstualisasi terhadap reformasi yang berlangsung di tingkat nasional serta meningkatkan kualitas demokrasi yang sedang berjalan. Pendidikan politik yang dilakukan PKB sekaligus menandai pergeseran paradigma politik NU, yang juga berarti pergeseran paradigma Islam politik. Islam politik pasca reformasi relatif tidak mempermasalahkan posisi formal Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suatu fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan di tanah air pada periode sebelumnya.[17]

[17] Zuhri Humaidi, “Transformasi Islam Politik Era Reformasi (Studi Terhadap Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Skripsi dengan judul "Pemikiran Politik KH. Badri Mashduqi" oleh As'ari. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Dalam skripsi ini dipaparkan pemikiran politik KH. Badri Mashduqi, seorang yang terjun ke dunia politik sejak tahun 1971 saat NU eksis sebagai partai politik. KH. Badri juga masih aktif tatkala partai NU berfusi ke PPP. Dalam pandangan KH. Badri Mashduqi, politik bagi kiai adalah kata lain dari dakwah. Pandangan politik KH. Badri Mashduqi berpijak pada doktrin *Ahlussunnah Wal Jamaah*, di mana politik merupakan satu kesatuan dengan agama. Meskipun dalam hal ini ada garis singgung antara sisi politik dan agama, namun secara fungsional harus dibedakan. Sisi agama diperankan oleh kiai, sementara politik diperankan oleh *umara*. Keterlibatan kiai dalam politik adalah untuk mengontrol kegiatan politik agar tidak bertentangan dengan agama.[18]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam penelitian, sebab dengan ini cara yang ditepuh akan dipaparkan. Untuk itu agar penulisan penelitian ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian *Relasi Kuasa Nahdlatul Ulama (NU) dan Politik Pasca-Reformasi (Studi Kasus NU Jawa Timur Tahun 2004-2014)* merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah

---

Politik PKB Tahun 1998-2008 di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur)" (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010), viii.

[18]As'ari, "Pemikiran Politik KH. Badri Mashduqi", (Skripsi tidak diterbitkan, Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.[19] Sementara jenis/tipe penelitian ini adalah studi kasus.

Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelahaannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Pendekatan studi kasus ini pada hakikatnya terfokus kepada kasus *(case)*. Kasus-kasus ini dapat diperoleh dari kasus yang unik, konteks khusus, isu- isu yang sedang berkembang, budaya, alamiah, holistik, fenomena dan lain-lain[20]. Menurut Denzin, berkenaan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus menurut adalah sebagai berikut: (a) membatasi kasus, menentukan objek dari penelitian, (b) meyeleksi fenomena-fenomena, tema atau isu (sebagai pertanyaan penelitian, (c) menentukan pola data untuk mengembangkan isu, (d) obsevasi triangulasi, (e) menyeleksi alternatif interpretasi, (f) mengembangkan kasus yang telah ditentukan.[21]

b. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a) Data tentang bentuk relasi kuasa Nahdlatul Ulama dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014.
b) Data tentang terbentuknya relasi kuasa Nahdlatul Ulama dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur Tahun 2004-2014.
c) Data tentang prospek relasi kuasa NU dan politik dalam suksesi kepemimpinan politik ke depan.

---

[19]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2008), 6.
[20]M. Syahran Jailani. *Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenology, Grounded Theory dan Studi Kasus)*, Jurnal Edu-Bio; Vol. 4 Tahun 2013, 48
[21]Norman Denzin K. & Yvonna S. Lincoln (Eds.), *The Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks, CA: Sage, 1994), 244; Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sumber Data

Terkait sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a). Sumber Data Primer

Sumber Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya.[22] Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, di mana penentuan ditentukan dengan pertimbangan tertentu.[23] Dalam hal ini kriteria yang dipakai untuk memilih informan adalah tokoh yang pernah menjabat sebagai pengurus di PWNU Jawa Timur kurun waktu tahun 2004-2014 dan dinilai memahami tentang relasi kuasa NU dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014. Tokoh NU yang dimaksud yakni; pertama, Kiai Ali Maschan Moesa yang pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur periode 1999-2008.

Informan kedua adalah Kiai Mutawakkil Alallah. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur periode 1999-2004, Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur periode 2008-2013 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur untuk periode kedua, tahun 2013-2018. Informan ketiga adalah Kiai Abdurrahman Navis, yang pernah menjabat sebagai Syuriah PWNU Jawa Timur periode 2008-2013 dan saat ini sebagai Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur periode 2013-2018). Informan keempat yakni Prof. Shonhaji Sholeh yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Timur periode 2013-2018.

---

[22]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 114.
[23]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal, dokumen, kliping, atau karya tulis ilmiah.[24] Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa sumber sekunder antara lain:

Buku *Kyai di Panggung Pemilu dari Kyai Khos sampai High Cost* karya Munawar Fuad Noeh. Buku ini memaparkan bagaimana peran kiai dalam perpolitikan di Indonesia, kiai dan tatanan politik di Jawa Timur, begitu juga posisi kiai dalam konstelasi politik di Jawa Timur pada pilpres tahun 2004.[25]

Buku *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama* karya Abdul Halim. Buku yang merupakan hasil disertasi ini, memotret intrepretasi *Ahlussunnah Wal Jamaah* (sebagai basis teologis NU) menurut para elit NU yang berada pada empat partai politik Islam, yakni PKB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di sisi lain, buku ini juga memotret bergesernya elit agama (kiai) dari *cultural broker* menjadi *political broker* dan *political actor*.[26]

Karya ilmiah berjudul *Fiqih Politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan* karya Achmad Warid dalam Jurnal Asy-Syir'ah vol. 43. No. I, 2009. Dalam karyanya ini, Warid memaparkan terjadinya pergeseran pola politik kiai NU dari politik kebangsaan ke politik kekuasaan. Pergeseran ini berkelindan dengan masalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan posisi di pemerintahan. Hal ini di antaranya berdampak pada polarisasi politik

[24]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*… 115.
[25]Munawar Fuad Noeh, *Kyai di Panggung Pemilu dari Kiai Khos sampai High Cost* (Jakarta Selatan: Renebook, 2014).
[26]Abdul Halim, *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama* (Jakarta:LP3ES, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kepentingan politik yang menyebabkan perseteruan yang terjadi antar kiai dan pesantren.[27]

Karya ilmiah berjudul *Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia* karya Fifi Nofiaturrahmah dalam Jurnal *Islamic Review* volume III No. 1 April 2014. Dalam karyanya ini, Fifi melihat corak gerakan kiai pada setiap masa. Di era revolusi, kemerdekaan, pemberontakan dan orde baru kiai berhasil mengimplementasikan politik kebangsaan sebagai ruh perjuangannya. Sedangkan pada era reformasi, gerakan kiai tersita pada urusan politik praktis yang lebih banyak membawa madharat daripada maslahat. Posisi kiai pada pergulatan politik praktis ini menjadikan citra kiai menjadi negatif di mata umat. Fifi menilai, idelnya politik kebangsaan kembali menjadi fokus utama para kiai.[28]

Buku *Pedoman Organisasi dan Administrasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur* yang diterbitkan oleh PW Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur. Buku ini memuat aturan-aturan dalam NU, seperti Muqaddimah Qonun Asasi NU, Surat Komite Hijaz, Anggaran Dasar (AD) NU, Anggaran Rumah Tangga (ART) NU, dan Pedoman Organisasi dan Administrasi NU. Buku ini memberikan gambaran bagaimana pengelolaan organisasi NU.[29]

Majalah *AULA* No. 4 Tahun XXXVIII April 2016. Majalah yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur ini berisi beberapa hal yang bisa dibaca sebagai kecenderungan sikap politik PWNU Jawa Timur pada pilpres 2004. Di

---

[27]Achmad Warid, *Fiqih Politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan*, Jurnal Asy-Syir'ah vol. 43. No. I, 2009.
[28]Fifi Nofiaturrahmah, *Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia*, Jurnal *Islamic Review* volume III No. 1 April 2014.
[29]Tim Revisi POA PWNU Jawa Timur, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur* (Surabaya: PW LTNNU Jatim, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara *content* dalam majalah tersebut adalah surat pembaca berjudul *Menguji Keotentikan Fatwa Gender, Siapa di Balik Fatwa Presiden Perempuan Haram,* rubrik Mimbar Aula dengan judul *Pemimpin dalam Islam,* rubrik Dirosah dengan judul *Kriteria Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Versi Fiqih Terapan,* rubrik Wawasan dengan tulisan berjudul *Kalkulasi Mengapa Pilih Mega-Hasyim* dan rubrik An nisak dengan tulisan berjudul *Presiden Perempuan dalam Islam.*

Selain buku, jurnal, majalah yang disebut di atas, sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini juga akan digunakan.

d. Metode Pengumpulan Data

a). Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.[30] Berkenaan dengan penelitian ini, informan yang dipilih peneliti adalah tokoh yang memang paham betul mengenai relasi kuasa NU dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014.

Dalam hal ini tokoh yang dimaksud adalah tokoh NU Jawa Timur guna mendapatkan data berkenaan dengan permasalahan tentang relasi kuasa NU dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014. Secara spesifik, data tersebut adalah data tentang bentuk relasi NU dan politik pasca-reformasi, data tentang proses terbentuknya relasi kuasa NU dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014, dan data tentang prospek relasi NU Jawa Timur dan politik dalam suksesi politik ke depannya.

---

[30]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial,* (*Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*),(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan penelaahan dan membaca buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dari pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.[31] Dalam analisis data model ini, setelah data dikumpulkan (periode pengumpulan data), dilakukan reduksi data, penampilan data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Proses reduksi ini akan memudahkan dalam penelitian dengan didapati gambaran yang lebih jelas. Di sisi lain juga akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahapan kedua yakni penampilan data.[32] Maksudnya adalah menyajikan data yang diperoleh ke dalam pola, umpamanya, sehingga data semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, cara yang paling sering digunakan untuk menampilkan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penampilan data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasar apa yang dipahami tersebut.

---

[31]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 91-92.
[32]Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan. Setelah data dirangkum, ditampilkan, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, suatu kesimpulan terkadang bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, terkadang tidak. Sebab masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif, sifatnya sementara dan akan berkembang tatkala peneliti terjun ke lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Berkenaan dengan temuan tersebut, (temuan) dapat berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas, menjadi jelas setelah diteliti.[33]

f. Uji Keabsahan Data

Dalam uji keabsahan data suatu penelitian, acapkali hanya ditekankan dalam uji validitas dan uji reabilitas. Selain pula objektifitas. Data penelitian kualitatif dapat dianggap valid, apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Terkait validitas, terdapat dua validitas dalam penelitian. Pertama validitas internal, kedua validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan derajat keakuratan yang dicapai. Sementara validitas eksternal berkaitan dengan apakah hasil penelitian bisa digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel itu diambil.[34]

Terkait dengan reliabilitas, konsistensi, dalam penelitian kualitatif memang tidak dijamin. Sebab dalam pandangan kualitatif, suatu realitas sifatnya majemuk (ganda), selalu berubah dan dinamis. Untuk itu, tidak ada suatu data

[33]Ibid., 99.
[34]Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tetap, konsisten dan stabil. Tabel di bawah ini mencoba menjelaskan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.[35]

Aspek	**Metode Kualitatif**
Nilai Kebenaran	Validitas Internal
Penerapan	Validitas Eksternal
Konsistensi	Reliabilitas
Netralitas	Objektivitas

Terkait uji nilai kebenaran, bisa dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi.[36] Perpanjangan pengamatan dimaksudkan, peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, atau yang baru. Diharapkan, sumber data semakin terbuka dan tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Di sisi lain, peneliti juga harus meningkatkan ketekunan dengan mengamati secara lebih cermat dan berkesinambungan. Harapannya, kepastian data, kronologi, rangkaian peristiwa akan teramati dengan baik. Penggunaan bahan referensi juga akan menunjang nilai kebenaran. Dalam arti, referensi dapat mendukung data yang telah ditemukan. Sebagai contoh, hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara.

Sementara aspek penerapan (validitas eksternal) meniscayakan bahwa peneliti harus membuat laporan penelitian yang jelas, rinci sistematis, dan dapat dipercaya. Hal ini diamksudkan agar pembaca hasil penelitian dapat memahami

[35]Ibid., 119-120.
[36]Ibid., 122-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara baik, sehingga bisa memperoleh gambaran apakah hasil penelitian tersebut bisa diterapkan di tempat lain atau tidak[37].

Terkait uji reliabilitas, dilakukan dengan audit terhadap seluruh proses penelitian. Bagaimana peneliti menentukan fokus masalah, masuk ke lapangan, dan segenap tahapan lain, diaudit oleh auditor yang independen. Umpamanya dilakukan oleh pembimbing. Terakhir, uji aspek netralitas, yakni apabila data yang diperoleh adalah data objektif. Objektifitas ini dinilai dengan indikator, bahwa data disepakati banyak orang. Dalam hal uji netralitas, pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan[38].

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori, yakni *Rational Choice Theory* oleh Patrick Baert dan Teori Politik Jawa Ben Anderson.

Bab ketiga berisi penjelasan tentang lokasi penelitian, termasuk peta sosial Jawa Timur dan posisi NU Jawa Timur dan konstelasi politik.

Bab keempat merupakan kajian analisis mengenai relasi kuasa NU dan politik pasca-reformasi di Jawa Timur tahun 2004-2014.

---

[37]Ibid., 130.
[38]Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id